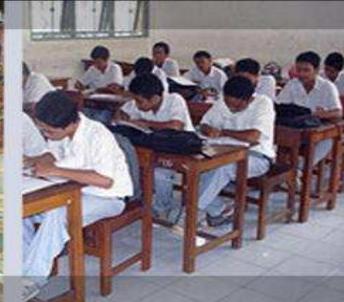




Kementerian Keuangan



POTENSI PENDANAAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN REDD+

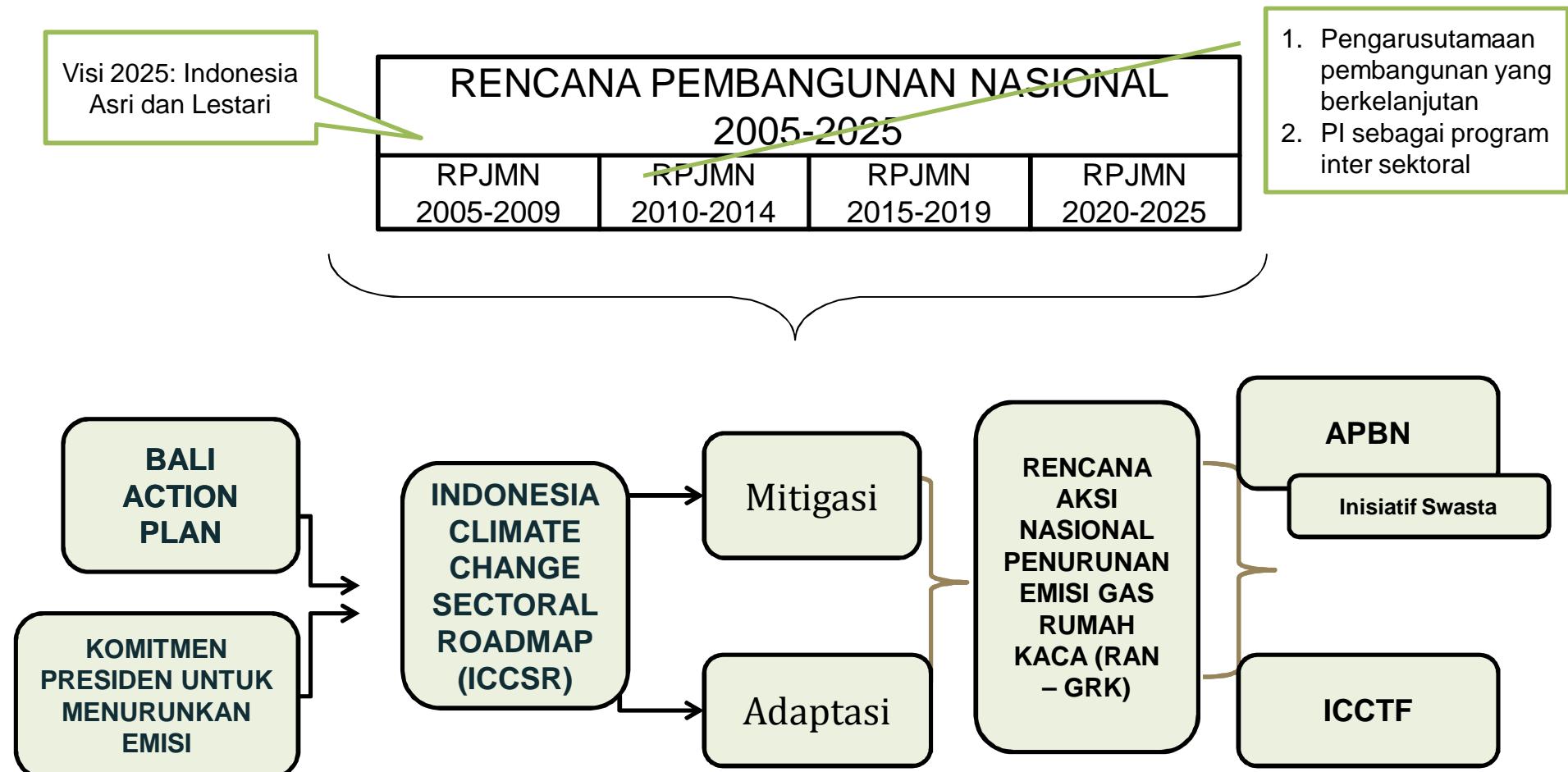
Prof. Dr. Singgih Riphat

Bogor, 21 Desember 2011

Latar Belakang

- Kemenkeu sebagai Bendahara Negara dan Otoritas Fiskal
- Peranan Kemenkeu di dalam Perubahan iklim
 1. Komitmen Para Menkeu diawali melalui *Bali Action Plan* (COP XIII Bali Des 2007)
 2. Mengarustamakan isyu-isyu perubahan iklim ke dalam ranah kebijakan fiskal
 3. Mendukung kebijakan-kebijakan sektoral (“*supporting, but critical*”) dalam rangka menjaga kelangsungan keuangan negara (*fiscal sustainability*)

Dukungan Kemenkeu - RAN-GRK

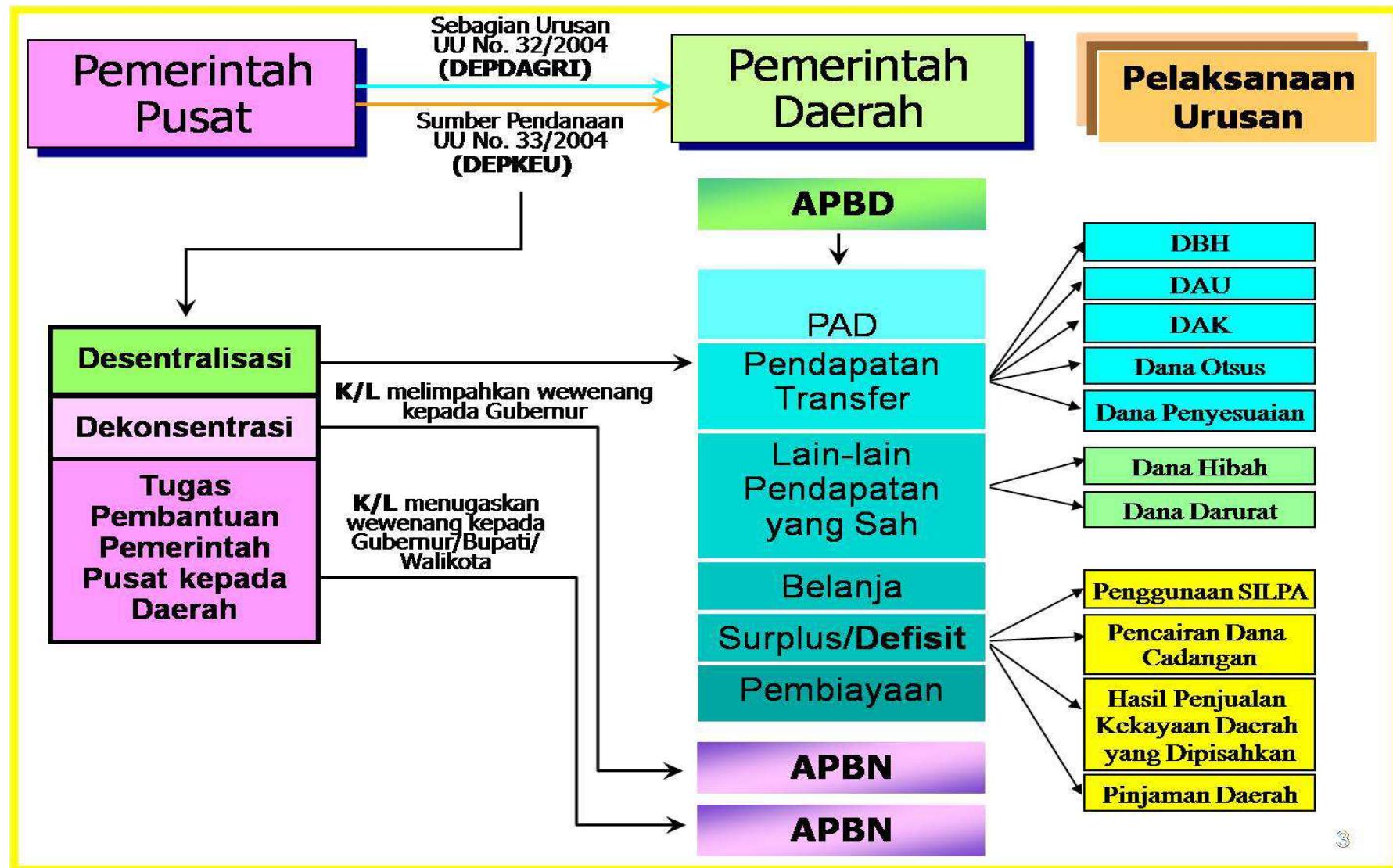


Sumber: Bappenas (2011)

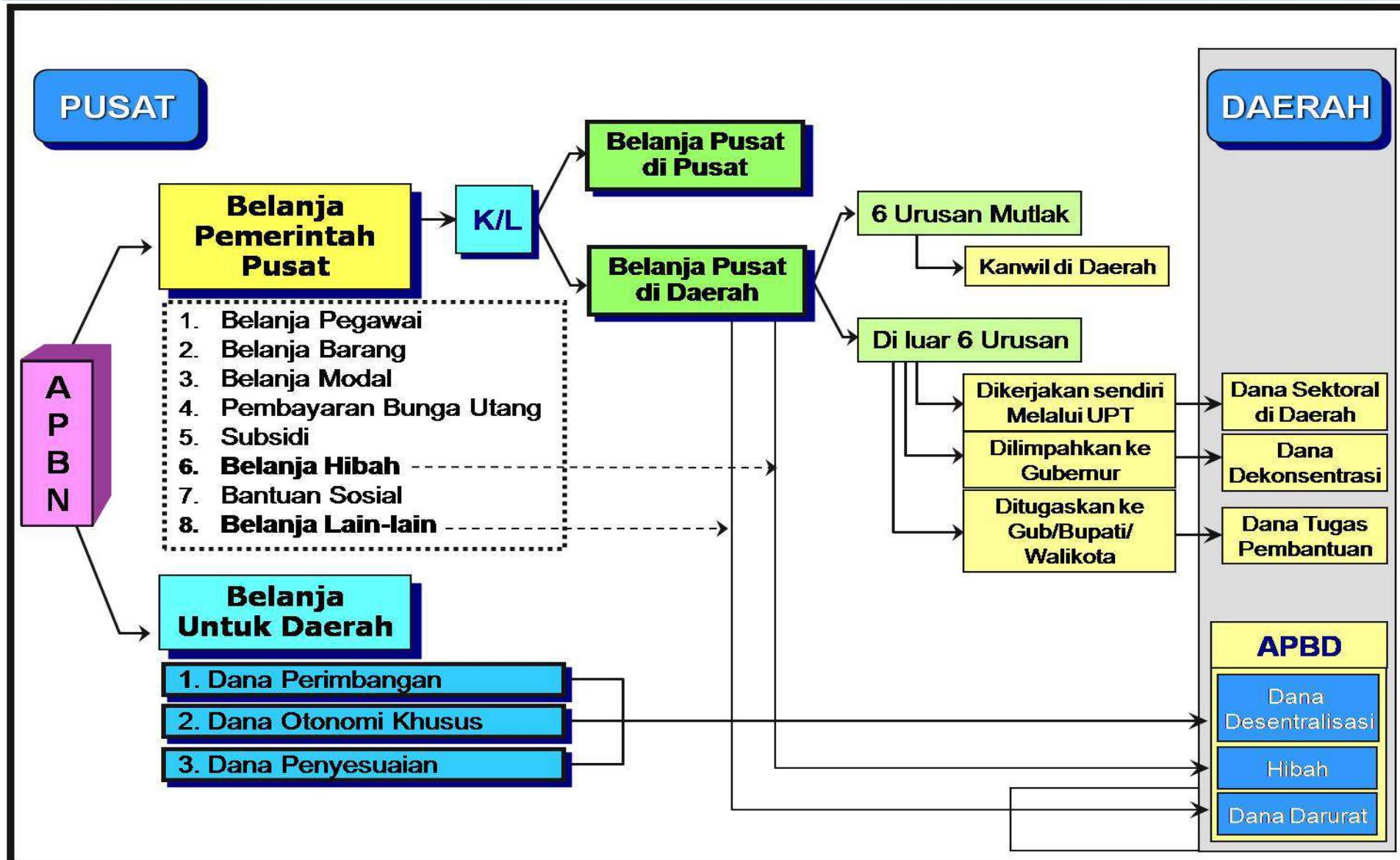
Struktur Pendanaan Publik

- Belanja Domestik (APBN)
 - Belanja Pemerintah Pusat (disalurkan melalui Kementerian dan Lembaga Pemerintah dan Negara lainnya)
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang & Jasa (belanja yang dikapitalisasi merupakan sumber investasi publik)
 - Belanja Modal (sumber investasi publik)
 - Anggaran Belanja untuk Pemerintah Daerah (Transfer Keuangan Daerah) disalurkan melalui Pemprov, Pemkab, dan Pemkot
 - Dana Perimbangan Keuangan Daerah
 - DBH (Dana Bagi Hasil): Pajak dan Sumber Daya Alam
 - DAU (Dana Alokasi Umum)
 - DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar prioritas nasional diantaranya pendidikan, kesehatan, irigasi, sanitasi, airminum, kelautan dan pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, listrik pedesaan, perumahan dan permukiman
 - Dana Otonomi Khusus
 - Dana Penyesuaian
 - DID (Dana Insentif Daerah): dialokasikan kepada daerah tertentu melalui kriteria tertentu atas keberhasilan kinerja (mulai tahun 2010).

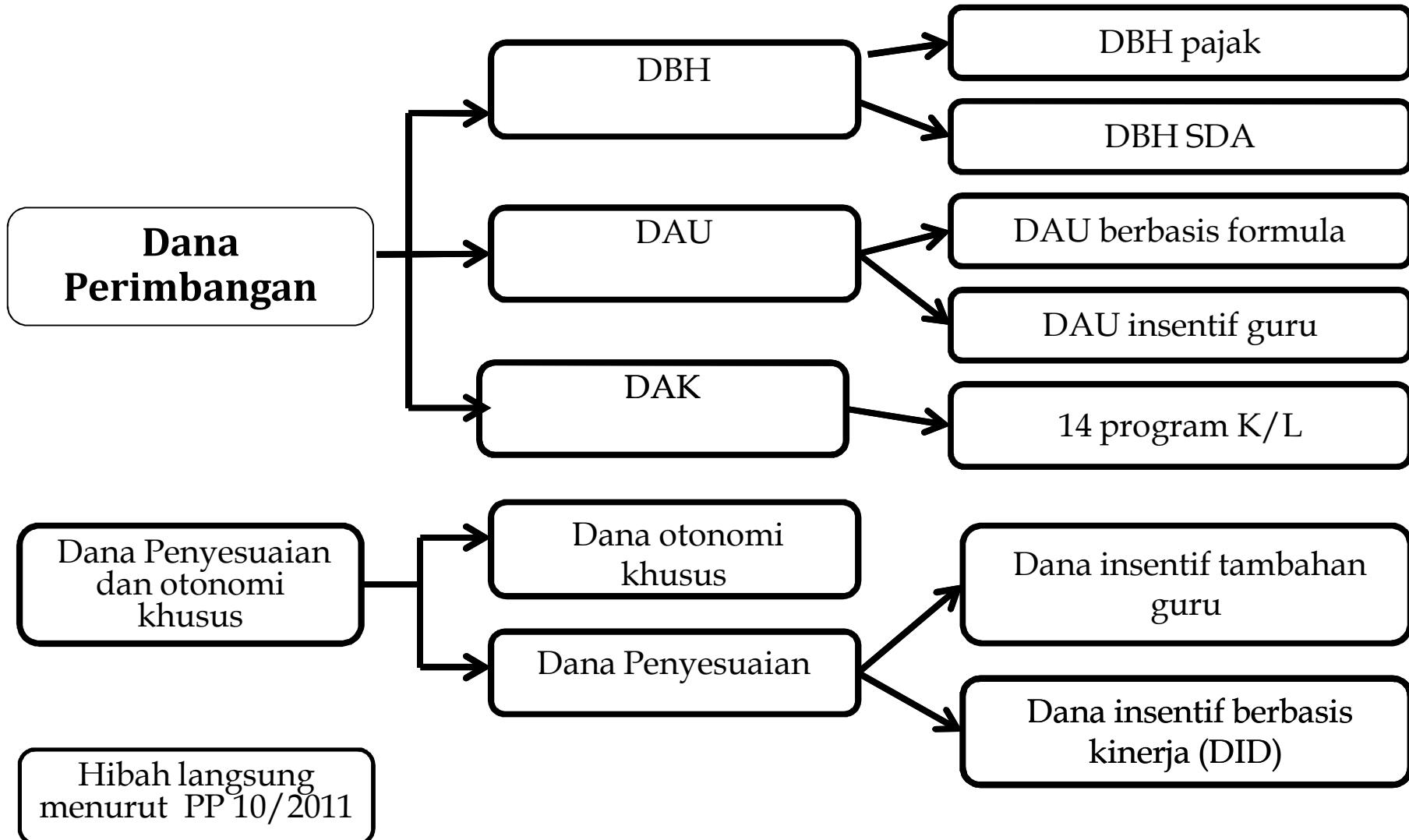
Kerangka Keuangan Negara



Alur : Money Follow Function



Mekanisme Transfer Fiskal Antar Daerah



Peluang Sumber Pendanaan Publik: Komitmen Internasional untuk Perubahan Iklim (2007 - 2016)

Source	Amount (million US\$)	Length of Funding	Type of Finance
AFD	800	2008 - 2010	Soft loans
World Bank	400	2010 - 2012	IBRD loan
World Bank	400	Unknown	Soft loans
AusAID	2	2008 - 2012	Grants
AusAID/IFCI	75.9	2007 - 2012	Grants
JICA	1000	2008 - 2010	Soft loans
JICA	16.5	2009 - 2014	Mix grant and loans
USAID	136	2010 - 2012	grants
Norway	1000	2010 - 2016	grants
DfID	2.4	Unknown	Technical assistance
CTF	3100	2010 -	Loan
FIP	76	2012 -	Mix grants and loan

Sumber: Brown & Peskett (2011), diolah



Lembaga Pendanaan Publik

1. ICCTF-Bappenas: koordinasi hibah untuk belanja Barang & Jasa (expenditure-based grant)
2. PIP-Kemenkeu: pengelolaan investasi publik (portofolio dan langsung)

Insentif Fiskal Terkini: Pengembangan Energi Panas Bumi

	Jenis Insentif	Jenis Kegiatan		
		Eksplorasi	Konstruksi	Operasi
1	Bea Masuk untuk sejumlah komponen suku cadang dan peralatan barang modal	<ul style="list-style-type: none"> • PMK 177 tahun 2007 • PMK 21 tahun 2010 jo PMK 176 tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> • PMK 177 tahun 2007 • PMK 21 tahun 2010 	<ul style="list-style-type: none"> • PMK 177 tahun 2007 • PMK 21 tahun 2010
2	Pajak Pendapatan (PPh)	PMK21 tahun 2010	PMK 21 tahun 2010	PMK 21 tahun 2010
3	Pajak Penjualan (PPN)	<ul style="list-style-type: none"> • PMK 178 tahun 2007 • PMK 21 tahun 2010 	PMK 21 tahun 2010	PMK 21 tahun 2010
4	Biaya eksplorasi	Alokasi APBN 2011		
5	Harga listrik panas bumi: a. Harga tertinggi (USD 9.7 cent/kwh) b. Off-take guarantee (Penjaminan usaha PT PLN sebagai “Going-Concern”)			<p>a. Permen ESDM 32 tahun 2009 dan Permen ESDM 2 tahun 2011</p> <p>b. Perpres 4 tahun 2010 and PMK 77 tahun 2011 (diperbarui oleh PMK139 Tahun 2011)</p>

Terima Kasih